

## PERSEPSI PEGAWAI BAGIAN KEUANGAN DINAS KABUPATEN SRAGEN TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Afrilia Fitri Wulandari<sup>1</sup>, Anita Wijayanti<sup>2</sup>, Yuli Chomsatu Samrotun<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. KH. Agus Salim No.10 Surakarta

Email: afrilia\_fw@yahoo.co.id

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan berdasarkan persepsi pegawai bagian keuangan. Variabel independen pada penelitian ini adalah keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, asimetri informasi dan perilaku tidak etis, sedangkan variabel dependen adalah kecurangan (*fraud*). Pengumpulan data menggunakan teknik *Quota Sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 59. Data berupa data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Responden pada penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan di 13 SKPD Kabupaten Sragen. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 17. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*), sedangkan asimetri informasi dan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Seluruh variabel independen pada penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*).

**Kata Kunci:** *fraud, keefektifan, kompensasi, penegakan, pengendalian*

### 1. PENDAHULUAN

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Albrecht (2003) mendefinisikan *fraud* sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban. *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum (*illegal acts*). Menurut Sukanto (2009), *fraud* merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya, dalam (Adinda, 2015).

Akhir-akhir ini kita sering mendengar pemberitaan di media masa mengenai kasus-kasus tindak kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pegawai pemerintah yang kurang bertanggungjawab. Kasus-kasus tersebut misalnya : kasus korupsi kas daerah kabupaten sragen 2003-2010 yang dilakukan oleh mantan Bupati Sragen sehingga harus membayar uang kerugian Negara sebesar Rp 10,5 miliar dan Mantan Bupati tersebut telah melakukan uang pengganti kerugian Negara dalam tindak korupsi yang dilakukannya, (Antara, 2015).

Kasus lain yaitu korupsi dana purnabakti DPRD Sragen yang menjerat 17 eks legislator. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan 17 eks anggota DPRD Sragen periode 1999/2004 yang divonis 1 tahun 2 bulan penjara dalam sidang putusan pada 22 September 2008, selain itu Pengadilan Negeri sragen meminta 17 eks legislator itu mengembalikan uang yang dikorupsi dengan jumlah bervariasi, (Duhri, 2016).

Kepemerintahan merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk mampu mengelola keuangan. Namun dengan adanya tindak kecurangan tersebut masyarakat dan Negara mengalami kerugian yang tidaklah sedikit. Seharusnya tindak kecurangan (*fraud*) tersebut tidak boleh terjadi di Kabupaten Sragen karena tindakan tersebut sangatlah merugikan.

Kegagalan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan tersebut kemungkinan dapat diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, asimetri informasi dan perilaku tidak etis. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya kecurangan di sektor

pemerintahan. Jika hal-hal tersebut terdeteksi sedini mungkin maka tindak kecurangan bisa dicegah dan diminimalisir sehingga terwujudlah pemerintahan yang baik dan sehat.

Berdasarkan keadaan tersebut dan belum banyaknya penelitian tentang *fraud* di sektor pemerintahan Kabupaten Sragen, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Persepsi Pegawai Bagian Keuangan Dinas Kabupaten Sragen Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan”, sehingga dengan adanya penelitian ini akan dapat diketahui faktor-faktor penyebab kecurangan di sektor pemerintah. Harapan setelah dilakukannya penelitian ini, akan dapat mewujudkan pencegahan terjadinya kecurangan sehingga tercipta pemerintahan yang baik.

## 2. METODOLOGI

### 2.1 Jenis Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dikuantifikasikan. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pegawai bagian keuangan di 13 SKPD Kabupaten Sragen. Ruang lingkungnya membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan berdasarkan persepsi pegawai bagian keuangan dinas Kabupaten Sragen.

### 2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

- a. Variabel dependent yaitu *fraud* (Y).
- b. Variabel independent yaitu (X) yang meliputi :
  - 1) Keefektifan pengendalian internal
  - 2) Kesesuaian kompensasi
  - 3) Penegakan peraturan
  - 4) Asimetri informasi
  - 5) Perilaku tidak etis

Definisi operasional adalah melekatkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu. Pengertian operasional variabel ini kemudian diuraikan menjadi indicator empiris yang meliputi :

1. Pengertian *fraud*  
*Fraud* merupakan tindakan-tindakan *illegal* yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.
2. Keefektifan pengendalian internal  
Keefektifan pengendalian internal merupakan persepsi pegawai dinas mengenai keefektifan penerapan sistem / prosedur yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan tertentu dalam suatu instansi.
3. Kesesuaian kompensasi  
Kesesuaian kompensasi merupakan persepsi karyawan tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka.
4. Penegakan peraturan  
Penegakan hukum/peraturan merupakan persepsi pegawai instansi pemerintah mengenai penegakan hukum / aturan yang berlaku di suatu instansi tempat para pegawai itu bekerja.
5. Asimetri informasi  
Asimetri informasi merupakan kondisi dimana pihak dalam atau pengelola perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau pihak pemakai informasi selain pengelola.
6. Perilaku tidak etis  
Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum.

### 2.3 Sumber Data dan Responden

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner berupa daftar pertanyaan.

## 2.4 Populasi dan Sampling

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan di SKPD Kabupaten Sragen. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan di 13 SKPD Kabupaten Sragen yang terdiri dari : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Arsip dan Dokumentasi, dan Kantor Perpustakaan Daerah. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *Quota Sampling*.

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden

## 2.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner yang terdiri dari sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang diukur dengan menggunakan skala linkert dengan alternatif lima jawaban yang mengukur sikap dan menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diajukan.

## 2.7 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

### Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. Gambaran tersebut meliputi: usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan jabatan.

### Teknik Pengujian Instrumen

Pada penelitian ini dilakukan uji instrument untuk mengetahui validitas dan reliabilitas item pertanyaan dalam pengukuran variabel. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 17.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya item pertanyaan pada kuesioner. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui suatu instrumen dikatakan valid atau layak digunakan apabila *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r tabel. Hasil uji menunjukkan bahwa *Corrected Item-Total Correlation* semua item pertanyaan dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari r tabel untuk 59 sampel yaitu 0,256 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan adalah valid.

### 3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajekan atau konsistensi alat ukur yang menggunakan skala, kuesioner atau angket. Maksudnya untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha*. Menurut Sekaran (1992), reliabilitas dikatakan baik apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut reliabel.

### 3.3 Analisis Regresi

#### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode *One sample Kolmogorov Smirnov Test*. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi secara teoritis / normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan melihat signifikan (*Asymp sig*) yang dihasilkan pada output. Jika nilai signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka akan terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 1 :

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kolmogorove Smirnov**

Asymp Sig. 2Tailed	Signifikansi	Keterangan
0,322	0,05	Distribusi Normal

Dari tabel diatas , nilai Asymp Sig. 2tailed sebesar 0,322 sehingga data berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas yaitu antar variabel independen yang terdapat dalam satu model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai VIF pada model regresi. Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 2 :

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	Standar	VIF	Standar	Keterangan
Keefektifan Pengendalian Internal	0,685	0,10	1.460	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesesuaian Kompensasi	0,624	0,10	1.602	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Penegakan Peraturan	0,548	0,10	1,825	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Asimetri Informasi	0,915	0,10	1.093	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Perilaku Tidak Etis	0,687	0,10	1.455	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan tabel 2 output hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* kelima variabel lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 3. Hasil Uji regresi Linear Berganda**

Model	B
1 (Constant)	6.757
Keefektifan Pengendalian Internal	-.234
Kesesuaian Kompensasi	-.058
Penegakan Peraturan	-.030
Asimetri Informasi	.467
Perilaku Tidak Etis	.602

Berdasarkan tabel 3 diatas, model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 6,757 - 0,234X_1 - 0,058X_2 - 0,030X_3 + 0,467X_4 + 0,602X_5$$

#### Hasil Uji F

**Tabel 4. Hasil Uji F**

	F hitung	F tabel	Sig.	Standar Sig	Keterangan
Uji F	9,664	2,389	0,000	0,05	Ha diterima

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 9,664. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2,389, maka nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, asimetri informasi dan perilaku tidak etis secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud*, sehingga model layak untuk digunakan

#### Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel pada signifikansi 0,05.

**Tabel 5. Hasil Uji t**

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Standar Sig	Keterangan
H1	-0,941	-2,006	0,351	0,05	Ditolak
H2	-0,307	-2,006	0,760	0,05	Ditolak
H3	-0,117	-2,006	0,907	0,05	Ditolak
H4	3,831	-2,006	0,000	0,05	Diterima
H5	3,332	-2,006	0,002	0,05	Diterima

Hipotesis 1 menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini dapat dilihat dari nilai  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  ( $-2,006 \leq -0,941 \leq 2,006$ ). Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,351, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hipotesis 2 menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini dapat dilihat dari nilai  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  ( $-2,006 \leq -0,307 \leq 2,006$ ). Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,760, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hipotesis 3 menyatakan bahwa penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini dapat dilihat dari nilai  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  ( $-2,006 \leq -0,117 \leq 2,006$ ). Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,907, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hipotesis 4 menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,831 > 2,006$ ). Nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hipotesis 5 menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,332 > 2,006$ ). Nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,002, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

#### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	Adjusted R Square	Keterangan
1	.428	42,8 %

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,428, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, asimetri informasi dan perilaku tidak etis sebesar 42,8 %, sedangkan sisanya sebesar 57,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Variabel-variabel lain tersebut misalnya gaya kepemimpinan, yaitu keadilan distributive, keadilan prosedural, kultur organisasi, komitmen organisasi, dan peran audit intern.

### 3.4 Pembahasan

#### Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Terjadinya *Fraud*

Hasil pengujian hipotesis pertama ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika *et al.* yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*). Mulyadi (2011) dalam Mustika *et al.* (2016) menyatakan bahwa di dalam suatu instansi pengendalian internal yang dapat tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) karena dalam mengambil keputusan manajemen bisa saja kurang mempertimbangkan hal buruk yang mungkin terjadi karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur yang dijalankan kurang sesuai dengan yang seharusnya. Terjadinya praktek kolusi disuatu instansi dimana individu yang bertindak bersama-sama dapat sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai bagian keuangan di SKPD Kabupaten Sragen mempersepsikan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Hal ini dikarenakan pada SKPD Kabupaten Sragen telah melaksanakan pengendalian dengan baik, sehingga variabel keefektifan pengendalian internal tidak mampu untuk mendeteksi kecurangan.

#### **Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Terjadinya *Fraud***

Hasil pengujian hipotesis kedua ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Hal ini didukung oleh penelitian Mustika *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*), sehingga kesesuaian kompensasi tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*). Sulistyowati (2007) dalam Mustika *et al.* (2016) menemukan bahwa kesesuaian kompensasi/kepuasan gaji tidak berpengaruh dengan persepsi aparatur pemerintah mengenai tindak korupsi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pegawai bagian keuangan SKPD Kabupaten Sragen mempersepsikan bahwa kesesuaian kompensasi tidak mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, karena kecurangan bisa saja terjadi karena sifat manusia yang serakah dan selalu merasa kurang. Sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan variabel kelima yaitu perilaku tidak etis.

#### **Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Terjadinya *Fraud***

Hasil pengujian hipotesis ketiga ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan tidak mempengaruhi terjadinya *fraud*. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara penegakan peraturan terhadap terjadinya *fraud*. Hal ini ditunjukkan bahwa di SKPD Kabupaten Sragen telah menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku, para pejabat tanggap dalam penanganan pelanggaran peraturan, kegiatan operasional instansi dilaksanakan sesuai dengan standard dan peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi dan pemerintah, pegawai disiplin waktu, serta semua pegawai menjalankan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sehingga penegakan peraturan tidak mampu untuk mendeteksi adanya kecurangan.

#### **Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Terjadinya *Fraud***

Hasil pengujian hipotesis keempat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Karena pada koefisien regresi bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi, maka akan meningkatkan terjadinya *fraud*. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*). Penelitian Wilopo (2006) dalam Najahningrum (2013) menghasilkan bahwa dengan adanya asimetri informasi yang tinggi akan memperbesar kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Pengelola organisasi lebih banyak mengetahui informasi keuangan dibandingkan dengan pihak pengguna laporan keuangan, yaitu masyarakat. Pemerintah merupakan pihak pengelola laporan keuangan. Pengelola laporan keuangan mengetahui laporan keuangan yang sebenarnya karena pengelola terlibat langsung dalam pembuatan laporan keuangan. Sedangkan masyarakat sebagai pihak luar tentu hanya mendapatkan informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengelola. Dengan keadaan yang seperti ini akan membuka kesempatan pengelola untuk membuat laporan keuangan yang tidak semestinya. Jika dalam suatu organisasi menerapkan keterbukaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasional yang berpengaruh pada laporan keuangan, tentu hal tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan.

### **Pengaruh Perilaku Tidak etis Terhadap Terjadinya *Fraud***

Hasil pengujian hipotesis kelima diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Karena koefisien regresi variabel perilaku tidak etis bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Artinya bahwa semakin tinggi perilaku tidak etis akan meningkatkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Mustika *et al* (2016) dan Zulkarnain (2013) yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan. Dengan demikian, semakin tinggi perilaku tidak etis yang terjadi pada suatu organisasi akan meningkatkan peluang terjadinya *fraud*, sebaliknya, jika semakin rendah perilaku tidak etis maka akan mengurangi terjadinya *fraud*. Walaupun di perilaku tidak etis jarang terjadi di lingkungan instansi kabupaten Sragen, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Hal ini berarti bahwa, pegawai bagian keuangan mempersepsikan bahwa perilaku tidak etis mempengaruhi terjadinya *fraud*. Perilaku tidak etis tersebut misalnya penggunaan aset (mobil dinas) untuk kepentingan pribadi, sehingga perilaku ini dapat merugikan Negara dan termasuk tindak kecurangan karena telah menggunakan aset tidak semestinya.

## **4. KESIMPULAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*), kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*), penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*), asimetri informasi berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*), dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*).

Sebagaimana layaknya penelitian empiris pada umumnya, penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga memungkinkan menimbulkan hambatan pada hasil penelitian. Keterbatasan tersebut yaitu sampel penelitian hanya dilakukan pada 13 SKPD Kabupaten Sragen sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Selain itu, penelitian ini terbatas pada lima variabel, yaitu keefektifan pengendalian internal, kesesuaian komunikasi, penegakan peraturan, asimetri informasi, dan perilaku tidak etis.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian di Kabupaten se-Jawa Tengah sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan. Peneliti selanjutnya diharapkan pula untuk menambah variabel penelitian yang belum dimasukkan pada penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antara. (2015, Mei 4). *Kasus Korupsi Kas Daerah: Mantan Bupati Sragen Bayar Uang Pengganti Rp 10,5 Miliar*. Retrieved November 3, 2016, jam 9.30 from m.semarangpos.com.
- Duhri, M. K. (2016, April 11). *Korupsi Purnabakti DPRD Sragen: MA Tolak Permohonan PK 17 Eks Legislator* Retrieved November 3, 2016, jam 9.44 from m.semarangpos.com.
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang
- Priyatno, D. (2009). 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS17. Andi: Yogyakarta
- Sari, D. (2016). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Sektor Pemerintahan Kota Bandar Lampung. *Tesis*. Universitas Lampung
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta: Bandung
- Trimurti. (2014). *Modul Kuliah Metodologi Penelitian*. UNIBA: Surakarta
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Salemba Empat: Jakarta
- Zulkarnain, R. M. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (studi kasus pada dinas se-Kota Surakarta). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang